

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. (n.d.).
<https://bapenda.tasikmalayakota.go.id>
- Dwantri, M. P., & Mau, A. O. E. (t.t.). *Evaluasi Strategi SAMSAT Dalam Peningkatan Pajak Kendaraan di Kabupaten Ende*. 19(02).
- Gunadi, M. L. S., & Kustinah, S. (t.t.). Implementation Of Psap No. 02 Concerning Cash-Based Budget Realization Reports At The Regional Inspectorate Of West Java Province. . . *Costing*.
- Halim, A., K., M. S. (t.t.). *Manajemen keuangan daerah*.
- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). (2024). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*, <https://ifacweb.blob.core.windows.net/publicfiles/2024-11/IPSASB-2024-Handbook-Volume1.pdf>
- Loupatty, L. G. (2025). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Ambon*. 7(1).
- Machfiroh, I. S., Hadiani, Y., & Maulana, M. F. (2025). Efektivitas Dan Efisiensi Dari Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 6(2), 123–140.
<https://doi.org/10.37715/Mapi.V6i2.3242>
- Mahmudi. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo, mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Naufal, M. M., Hasugian, H., & Harmain, H. (2024). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang*

Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. 16(2024).

- Niayah, N., & Danisya, D. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal sosial dan sains*, 2(6), 731–736. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i6.409>
- OECD. (2024). *Tax Administration 2024: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/11/tax-administration-2024_5c4606e4/2d5fba9c-en.pdf
- Paramananda, I. K. D., & Diatmika, I. P. G. (2025). *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2023*. 14(2).
- Pongilatan, M. G., Pangerapan, S., & Mintalangi, S. (2025). Pengaruh kepadatan kendaraan bermotor dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor transportasi terhadap pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020-2024. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(2), 378–386. <https://doi.org/10.58784/rapi.348>
- Putri, H. D. (t.t.). Efektivitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Kliring Pajak Pada Kantor Bersama Samsat Dompu. . . *P.*, 4(2).
- R. Terry, G. (2012). *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saputra, M. A., Ismatullah, I., & Nurmilah, R. (2025). *Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah, Di Samsat Kota Sukabumi*. 01(04).
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Saputra, A., & Ismatullah, I. (2025). Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 2(1). <http://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp/article/view/406>

Permendagri No.77 Tahun 2020

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149547/permendagri-no-77-tahun-2020>
 Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>